



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NO 17 TAHUN 2013 TENTANG KEORGANISASIAN
MASYARAKAT TERHADAP PEMBUBARAN
ORMAS ISLAM DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Dijukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

ILHAM REZKI PERDANA

NIM: 11724100599

PROGRAM S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **PERATURAN PEMERINTAH UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO 2
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2013 TENTANG
KEORGANISASIAN MASYARAKAT ATAS
PEMBUBARAN ORMAS ISLAM MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

yang ditulis oleh :

Nama : **ILHAM REZKI PERDANA**
NIM : 11724100599
Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasa

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2021
Pembimbing Skripsi

IRFAN ZULFIKAR

NIP. 1975052120060041003

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Sketsa dengan judul, “**PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2013 TENTANG KEORGANISASI MASSYARAKAT TERHADAP PEMBUBARAN ORMAS ISLAM DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**” yang ditulis oleh :

Nama : ILHAM REZKI PERDANA
NIM : 11724100599
Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasa

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua : Rahman Alwi, MA
Sekretaris : Irfan Zulfikar, M.Ag
Penguji I : Dr. Yusran Sabili, M.Ag
Penguji II : Ade Faris Fahrullah, M.Ag

.....
.....
.....
.....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2013 TENTANG KEORGANISASIAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBUBARAN ORMAS ISLAM MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Oleh

Ilham Rezki Perdana

Pada zaman sekarang ini agama Islam sangat menjadi perbincangan hangat di negara Indonesia. Salah satunya adalah terdapatnya Organisasi Masyarakat Islam yang menuai banyak kontroversi. Di negara Indonesia sendiri ada beberapa Organisasi Masyarakat berbasis Islam, yaitu pertama Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Muhammadiyah dan masih banyak lag. Tetapi masih teringat didalam ingatan kita tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengubah atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keorganisasian Masyarakat Terhadap Ormas Islam Dalam Perpektif Siyasah (2) Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari beberapa peraturan Perundang-Undangan dengan pokok permasalahan yang terkait dengan permasalahan ini yang selanjutnya dijadikan bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa karya ilmiah atau buku terdahulu untuk mencari teori-teori dan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang pembubaran Ormas Islam menurut Fiqih Siyasah.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwasanya Hizbu Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam adalah organisasi yang ingin mendirikan negara Khilafah dan menegakkan Syari'at Islam di Indonesia yang mana itu menjadi alasan pemerintah membubarkan Organisasi Masyarakat ini yang tidak sesuai dengan ideologi pancasila. Proses dari pembubaran ini melalui Kementrian Hukum dan HAM dengan mencabut status badan hukum yang sudah dimiliki kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 sebagai tindak lanjut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Keorganisasian Masyarakat Terhadap Pembubaran Ormas Islam Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya, semoga kita tergolongh ummatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu disini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melaksanakan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua dan adik-adik yang telah memberikan dukungan, do'a dan motivasi secara moril maupun materil.
2. Kakak-kakak senior yang telah memberikan semangat dan dukungan.
3. Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing yang sangat sabar membimbing dan memberi arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
5. Almamater tercinta UIN SUSKA Riau.

Penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umum nantinya. Amiin.

Pekanbaru, 30 Juni 2021

ILHAM REZKI PERDANA
NIM. 11724100599

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	.
ABSTRAK.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORI HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN FRONT PEMBELA ISLAM	18
A. Hizbut Tahrir Indonesia.....	18
1. Sejarah Hizbut Tahrir Indonsia	18
2. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir	22
3. Sejarah Hizbut Tahrir Di Indonesia	26
4. Pemahaman Keagamaan Organisasi Hizbut Tahrir	29
B. Front Pembela Islam	31
1. Latar belakang berdirinya Front Pembela Islam (FPI)	31
2. Format Kepemimpinan, Struktur dan Kekuasaan Dalam FPI	35
3. Standart Operasional Prosedur (SOP) Hisbah	44
4. Faham Keagamaan Front Pembela Islam (FPI)	46
BAB III NEGARA HUKUM, NEGARA HUKUM DALAM ISLAM, TEORI DEMOKRASI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN .	47
A. Negara Hukum	47
1. Gagasan Negara Hukum	47
2. Konsep Negara Hukum Kontemporer	48
3. Cita Negara Hukum Indonesia	52
B. Negara Hukum Dalam Islam	58
1. Negara Hukum Dalam Islam, Problem Penerapan Syari'at Islam	58

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Strategi Alternatif Penerapan Syari'at Islam di Indonesia	60
C. Teori Demokrasi	64
1. Pengertian Demokrasi	64
2. Model-Model Demokrasi	67
D. Keorganisasian Masyarakat	69
1. Tinjauan Teori Keorganisasian Masyarakat	69
2. Tinjauan Teori Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keorganisasian Masyarakat Terhadap Pembubaran Ormas Islam Dalam Perspektif Siyasah	73
1. PERPU Nomor 2 Tahun 2017	73
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013	74
3. Alasan Pembaruan HTI dan FPI	76
B. Perspektif Fiqih Siyasah Tentang Organisasi Masyarakat Yang Ada Di Indonesia	78
1. Perspektif Fiqih Siyasah Tentang Organisasi Masyarakat Di Indonesia	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam terminologi, Negara merupakan hasil konstruksi konseptual suatu organisasi sosial politik yang diakui memiliki kekuasaan atau kedaulatan dalam suatu wilayah, penduduk dan pemerintahan¹. Suatu bentuk sistem pemeritahan hadir dalam sebuah wilayah karena adanya kebutuhan untuk menjamin seluruh hak dari seluruh elemen Negara.

Sejak awal dinyatakan sebagai negara yang merdeka Indonesia menyatakan diri sebagai Negara Hukum yang tertuang dalam pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang Menyatakan “Indonesia Merupakan Negara Hukum”. Yang mana pada ketentuan tersebut mengharuskan Negara dalam menjalankan instrumen ber-Negara harus tunduk kepada segala aturan yang ada, yang mana aturan-aturan tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak yang melekat pada masyarakat dari awal terlahir didunia hingga meninggal dunia kelak².

Dalam arti luasnya hukum merupakan keseluruhan aturan normatif yang menjadi pembatas berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang didukung dengan adanya sanksi bagi pelanggarnya³. Dalam pendapat lain hukum secara luas dapat diartikan segala fenomena sosial yang terjadi

¹ Nurul Qamar dan Farah Rezah *Ilmu Kenegaraan (staatswissencaft)*. (Jakarta: Sinar Mitra Wacana Media 2015) hal.5

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta Timur: 2014), hal 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditengah-tengah masyarakat⁴. Fenomena yang terjadi dalam pergaulan masyarakat akan menimbulkan bentuk-bentuk aturan secara sendirinya yang mana aturan-aturan tersebut merupakan aturan yang bersifat normatif. Aturan normatif dalam kehidupan bernegara akan timbul dari lembaga-lembaga pemangku kekuasaan negara yang diberikan wewenang sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan⁵.

Semakin berkembang zaman, masyarakat dalam sebuah negara maka semakin berkembang tuntutan keteraturan dalam pola-pola berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap berkehidupan berketertaturan melahirkan sistem keorganisasian yang makin berkembang menjadi semacam *organizational imperative*. Pesatnya pertumbuhan masyarakat maka akan meningkatkan kecenderungan masyarakat dalam keaktifan di keorganisasian yang teratur.

Cicero mengungkapkan bahwasanya “pola keorganisasian yang teratur maka dengan sendirinya akan menghadirkan mekanisme sendiri yang berkenaan dengan proses pembuatan hukum, dan peradilan terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu akan menjadikan masyarakat lebih terorganisasi, akan tetapi juga dengan berkembang dengan pesatnya pertumbuhan masyarakat maka akan menyebabkan kompleksitas perkembangan hukum juga semakin tinggi, baik dari segi kuantitas hukum maupun kualitas hukum tersebut⁶.

⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: 2016) hal 4

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers 2011)

⁶ *Ibid* hal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk di Indonesia setidaknya ada empat kelompok pengertian hukum, yakni. *Pertama*, hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan atau yang dapat disebut dengan Hukum Negara (*The State Law*). Seperti undang-undang, yurisprudensi dan sebagainya. *Kedua*, hukum yang dibuat dan hadir dari dinamika kehidupan masyarakat. Seperti hal Hukum Adat (*The People's Law*). *Ketiga*, hukum yang berkembang dalam praktik dunia usaha dan melibatkan peranan para profesional di bidang hukum (*The Professional's Law*)⁷.

Dari beberapa kelompok hukum yang tertera diatas memiliki logikanya masing-masing, baik dari segi pembentukan, penerapan, maupun memberlakukannya dalam proses peradilan. Instansi-intansi yang terlibat dalam proses pembentukan atau pembuatan pada empat kelompok hukum negara di indonesia sedikitnya ada tiga lembaga yang terlibat, yakni pemerintahan parlemen dan pengadilan.

Pembuatan peraturan Peraturan perundang-undangan adalah Pembuatan Peraturan Perundang-pundangan yang mencakup Perencanaan, Penyusunan pembahasan, Pengesahan atau Penetapan dan pengundangan.

Peraturan Perundang-undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang⁸.

Dalam pembentuk Peraturan Perundan-undang di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

⁷ Ibid hal 5

⁸ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 7. Yakni, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁹.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang memiliki tingkatan yang sama dengan Undang-undang. Dalam proses PERPU merupakan Hak Eksklusif dari pada Presiden, Presiden yang mempunyai Hak untuk menetapkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang maka pada Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Berikutnya sudah harus Mendapat Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Apabila Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Tidak Disidangkan pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat Berikutnya maka dalam Waktu Paling Lambat Satu Tahun Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang yang Telah di Tetapkan oleh Presiden Batal Demi Hukum.

Di Indonesia Penerbitan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang sendiri sudah beberapa kali dilakukan, Peraturan Pengganti Undang-undang yang Pernah dikeluarkan antara lain, Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang pada masa itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belum Mengatur mengenai tindak pidana Terorisme secara khusus.

Tertera Pada Tanggal 10 Juli 2017 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

⁹ Ibid, Pasal 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Masyarakat atau yang sering disebut (ORMAS). Melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan keamanan.

Alasan dari Pemerintah Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut ialah karena Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak memadai lagi sebagai landasan untuk mencegah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang 1945¹⁰.

Tetapi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, tidak mendapat respon yang baik dari pada masyarakat terutama dari berbagai ORMAS yang merasa kemunculan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat merugikan dari pada ORMAS tersebut. Hampir seluruh Organisasi Masyarakat Islam mengajukan keberatan dan memberikan sinyal-sinyal penelokan yang sangat keras dalam berbagai Konfrensi di Media Masa terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut. Karena ORMAS Islam menganggap bahwa terbitnya PERPPU Tersebut untuk menjadikan Pemerintah dapat melakukan tindakan yang semena-mena terhadap ORMAS yang tidak sepaham dengan Pemerintah.

Adapun point Kontroversi dalam PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 yakni Ketentuan mengenai Asas Tunggal Pancasila yang Harus Diterapkan Oleh semua ORMAS termasuk ORMAS Keagamaan, adapun asas tunggal pancasila tersebut dianggap mengekang Ormas seperti yang terjadi pada zaman rezim

¹⁰ www.Liputan6.com/MenkoPolhukam menetapkan Perpu no2 tahun 2017 diakses pada 28 Oktober 2019

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Orde baru dibawah tangan besi Presiden Soeharto, yang mana pada masa itu Presiden menetapkan asas tunggal Pancasila untuk mengontrol secara ketat ORMAS yang ada Bahkan sampai kepada Organisasi Keaktivisan yang menaungi para Mahasiswa.

Berangkat kejadian dimasa lampau tersebut itu membuat banyak ORMAS dimasa kini tentunya merasa khawatir dengan diterbitnya PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 Tersebut, ditambah lagi dengan penerbitan PERPPU tersebut terkesan sangat mendadak dan dipaksakan, hal tersebut terlihat dari produk hukum yang diterbitkan Pemerintah berupa PERPPU yang mana dalam klafisikasi syarat penerbitan PERPPU terkesan diabaikan begitu saja oleh Pemerintah, adapun Klasifikasi Syarat yang terkesan terbaik ialah adanya kegentingan yang memaksa, yang mana banyak pihak beranggapan tidak ada suatu keadaan yang genting saat ini sehingga memaksa Pemerintah untuk menetapkan PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 Tersebut.

Tentunya kebijakan yang diambil Pemerintah dinilai sangat tidak bijak dimana kebijakan tersebut malah menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat, tentunya masyarakat takut sejarah yang telah lampau terulang kembali, sudah cukup 32 tahun masyarakat hidup bagai burung disangkar emas¹¹.

Adapun Ormas yang terkena dampak secara langsung ialah dengan dicabutnya Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia tepat 10 Hari setelah PERPPU Tersebut di terbitkan, Selanjutnya pada Tahun 2019 ditolaknya

¹¹ Ibid www.Liputan6.com/MenkoPolhukam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Perpanjangan Terdaftar Front Pembela Islam atau bisa disebut FPI yang tentunya membuat FPI tidak dapat Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan Pemerintah, Selanjutnya banyak Ormas berbasis keagamaan terpaksa merubah asas organisasi tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional. Seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain.

Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan dengan alasan tidak mau merubah dasar organisasi mereka dari yang dasar organisasi yang berbasis islam menjadi dasar organisasi ideologi pancasila¹². Adapun tidak maunya Hizbut Tahrir Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi organisasi dianggap sebagai cukup alasan untuk mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia. Tentunya kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut mendapatkan kritikan yang dari Yusril Ihza Mahendra selaku Pakar Hukum yang mana dalam keterangannya beliau mengatakan bahwa PERPPU tersebut berpotensi untuk memberangus ormas-ormas yang tidak sepemikiran dengan pemerintah. Tentunya cara-cara seperti ini sudah pernah terjadi dan selaku bangsa kita semua sepakat untuk tidak lagi memakai konsep pengekan dalam ber-Bangsa dan ber-Negara seperti yang terjadi pada masa orde baru.

Selain Hizbut Tahrir Indonesia ormas islam lainnya yang terkena dampak dari adanya PERPPU Nomer 2 Tahun 2017 ini ialah Front Pembela Islam dimana status keterangan terdaftar dari FPI tidak lagi diperpanjang oleh pemerintah karena FPI menolak untuk memasukkan Pancasila sebagai ideologi organisasinya. Penolakan memasukkan Pancasila sebagai dasar organisasi oleh

¹² WWW.Tempo.Co. Id. Mengapa HTI dibubarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

FPI bukan karena mereka tidak mengakui Pancasila sebagai Dasar Negara melainkan FPI beranggapan nilai-nilai ke-Islaman yang dianut oleh FPI sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

Dalam perpektif Fiqh Siyasah, kewenangan yang sama tersebut dimiliki oleh Wazir al-Tafwidh sebagai pembantu Khalifah bidang pemerintah dalam sistem ketatanegaraan islam. Adapun konsep Kemendagri dan Wazir al-Tafwidh dalam sistem ketatanegaraan islam terdapat beberapa persamaan yang meliputi kedudukan, kewenangan, dan sumber kewenangannya.

Dalam islam terdapat sistem *siyasah syar'iyah*, yaitu pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai syariat islam. Sistem tersebut menekankan bahwa seluruh kebijakan dan peraturan haruslah untuk kemaslahatan. Sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini menggunakan filsafat hukum islam, tujuan hukum atau *maqasidul ahkam* menyatakan bahwa tujuan atau peraturan itu diadakan atau dibentuk adalah untuk mendatangkan kemaslahatan masyarakat baik di dunia maupun diakhirat serta menolak kemudharatan dan menjunjung tinggi rasa keadilan yang mutlak¹³.

Para ulama memiliki perbedaan dalam ruang lingkup *siyasah syar'iyah*, namun perbedaan tersebut tidak mencakup prinsip dasar, akan tetapi hanyalah bersifat teknis semata. Secara garis besar ruang lingkup dalam *siyasah syar'iyah* dibagi dalam tiga yaitu: *siyasah dusturiyah* (politik perundang-undangan), *siyasah dauliyah/Siyasah Kharijiyyah* (politik luar negri) *siyasah*

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal,5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maliyyah (politik keuangan dan moneter). Dalam penelitian ini akan digunakan *siyasah dusturiyah*.

Siyasah dusturiyyah adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain atau dalam istilah modern disebut hukum konstitusi¹⁴

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانًا مَّرْصُومًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (QS.Al-Shaff Ayat : 4)

Makna dari shaff disitu menurut al-Qurtubi adalah menyuruh masuk dalam sebuah barisan (organisasi) supaya terdapat keteraturan untuk mencapai tujuan.

Dalam sebuah hadits diterangkan:

Artinya:“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan “tepat, terarah dan tuntas“. Suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi yang baik, proses juga dilakukan secara terarah dan teratur.¹⁵

Sosiologi islam adalah teori yang memiliki kajian tentang interaksi manusia kepada manusia kepada manusia yang lain serta lingkungan yang dibangun berdasarkan atas dasar pengalaman masyarakat muslim¹⁶.

¹⁴ Ridwan HR, *Fiqh Politik*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2007)

¹⁵ <https://syukrihaekal03.wordpress.com/tag/organisasi-dalam-perspektif-al-quran>

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah hlm* 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Setidaknya, ada tiga konsep penting dari Al-Quran yang dapat diasumsikan sebagai teori sosiologi islam yaitu 1.) *Tadafu* 2.) *Ta'aruf* 3.) *Ta'wun*

Bersangkat dari keterangan diatas penulis tertarik melalukan penelitian mengenai hak dari setiap Organisasi Kemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan hukum, dengan Judul “PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KEORGANISASIAN MASYARAKAT TERHADAP ORMAS ISLAM DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIAYASAH”.

B. Batasan Masalah

Adapun agar penelitian ini dapat terarah dan dapat memperjelas ruang lingkup pembahasan ini maka dari itu penulis perlu membuat batasan masalah, dikarenakan dengan adanya batasan masalah ini nantinya akan menjadikan penelitian lebih mudah diarahkan pembahasan nantinya. Adapun yang dibahas dalam batasan masalah ini tentang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keorganisasian Masyarakat Dalam Perpektif Siyasah, dan Perspektif fiqih siyasah tentang organisasi masyarakat yang ada di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keorganisasian Masyarakat Terhadap Ormas Islam Dalam Perpektif Siyasah

Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang organisasi masyarakat yang ada di Indonesia

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keorganisasian Masyarakat Dalam Perpektif Siyasah
2. Untuk mengatui perspektif fiqh siyasah tentang organisasi masyarakat yang ada di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Strata Satu (S1) Hukum Tata Negara Siyasah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademis bagi perkembangan studi dalam Hukum Tata Negara Siyasah.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai acuan dasar dalam penelitian. Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum normatif juga dijelaskan sebagai penelitian hukum yang doktriner yang diartikan sebagai penelitian yang bertumpu pada aturan-aturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian normatif ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian banyak melakukan pengkajian terhadap sumber data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dan bahan-bahan yang digunakan dalam berbagai literatur yang mempunyai pembahasan yang sama dengan permasalahan peneliti.

Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan komperatif, yakni memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang bersinggungan dengan objek kajian penelitian¹⁷ serta membandingkan Hukum Konvensional dengan Hukum Fiqh Siyasah atau Hukum Islam.

Sedangkan dalam metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Ialah pendekatan yang berorientasikan kepada struktur norma dalam urutan hierarki Perundang-undangan dengan memperhatikan keberadaan norma tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undang ini digunakan untuk melihat permasalahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

¹⁷ Zainuddin ali, *Metedeologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), Hal. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Hukum Formil Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yakni pendekatan yang bertumpu kepada sumber hukum sekunder yang memberikan berbagai penjelasan yang kini menjadi informasi mengenai konsep dari yang diteliti. Dalam pendekatan ini peneliti akan mengkaji mengenai pemikiran-pemikiran para ahli hukum terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang¹⁸.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah Bahan-bahan Hukum yang terkait kepada objek penelitian yang dibahas. Atau hukum yang bersifat otoritas, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Hukum Islam
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi Kemasyarakatan

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, hal 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder ialah sumber yang diperoleh dari Buku-buku, Dokumen, Jurnal Hukum dan Hasil Penelitian dalam Bentuk Skripsi, Tesis dan Disertasi yang berhubungan dengan Objek penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber bahan hukum ialah Sumber bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber bahan hukum sekunder dan Premier. Adapun Data Tersier ialah Enksiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka memudahkan penulis dalam melakukan penelitian terhadap pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yakni dengan menggunakan cara studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis (*library reserch*) mengenai berbagai sumber hukum yang dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta tersier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai macam dokumen yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, mapun terhadap dokumen-dokumen yang sudah ada, yakni dengan mengumpulkan berbagai macam ketentuan-ketentuan perundang-undangan, literatur dan artikel yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.

5. Analisi Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ialah suatu proses penafsira atau memaknai bahan hukum, analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan sebuah analisis yang dilakukan tanpa menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (Deskriptif) dengan kata lain atas bahan yang terkumpul karenanya dia lebih mengutamakan kualitas dari data dan bukan kuantitas.

Bahan-bahan hukum yang terkumpul baik dari bahan hukum primer atau bahan hukum islam, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu dengan menggunakan logika deduktif. Yakni metode pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke suatu yang khusus.

Dan bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan secara sistematis. Dan pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulis kedalam lima (5) bab, yang masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antar bab satu dengan bab yang lain saling memiliki keterkaitan, untuk lebih jelasnya penulis menguraikan satu persatu bab tersebut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Negara Hukum, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, Presiden sebagai kepala pemerintah dan negara.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP TEORI PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG

Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori-teori definisi Perundang-undangan, norma hukum, asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya penulis juga akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Presiden.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian dari rumusan masalah yang berkaitan dengan Perspektif Fiqh Siyasyah terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keorganisasian Masyarakat.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan saran yang diambil berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN FRONT PEMBELA ISLAM

A. Hizbut Tahrir Indonesia

1. Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir berdiri di Jerussalem, Palestina. Dipelopori oleh Sheikh Taqiyuddin al-Nabhani yang memiliki nama lengkap Muhammad Taqiyuddin ibn Ibrahim ibn Mustafa ibn Yusuf al-Nabhani. Nama belakangnya al-Nabhani dinisbahkan kepada kablilah Bani Nabhan yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim didaerah Ijzim termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara. Al-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909 M dan wafat pada tahun 1977 M/1398H. Dan dikuburkan di al-Auza'i Beirut.

Al-Nabhani hidup dan tumbuh dalam didikan keluarga yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Ayah al-Nabhani merupakan seorang pengajar ilmu-ilmu syari'ah pada kementrian pendidikan Palestina. Sedangkan ibu al-Nabhani juga menguasai beberapa ilmu cabang ilmu syari'ah yang dipelajari dari ayahnya yang bernama Yusuf ibn Ismail ibn Yusuf al-Nabhani yang dikenal sebagai penyair, sastrawan, ulama terkenal pada masa Daulah Ustmaniyyah¹⁹.

Perkembangan al-Nabhani tidak saja dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Sebagaimana layaknya anak-anak yang biasa lainnya al-Nabhani

¹⁹ Azman, *Jurnal Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia*, Vol. 7/ No. 1/ 2018. hal. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga menempuh pendidikan formal, dimulai dari pendidikan dasar di Ijzmi selanjutnya dilanjutkan kejenjang pendidikan yang menengah di Akka. Namun sebelum menyelesaikan pendidikannya atas dasar desakan dari kakeknya ia meneruskan pendidikannya di Al-Azhar, Kairo. Pada tahun itu dia berhasil meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya ia melanjutkan studinya di Kuliyah Darul-Ulum yang pada masa itu merupakan cabang dari Al-Azhar dan lulus pada Tahun 1932²⁰.

Setelah menyelesaikan studinya al-Nabhani kembali ke Palestina dan bekerja di Kementrian Pendidikan Palestina sebagai seorang guru disebuah sekolah menengah atas negeri di Haifa. Disamping itu ia juga mengajar disebuah madrasah Islam di Haifa. Kegiatan pengajarannya selalu berpindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah lainnya di berbagai kota. Aktivitas ini ia lakukan sejak tahun 1932 hingga tahun 1938. Pada tahun 1938 ia mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syari'ah. Dia ingin menjadi seorang hakim untuk menghapus pengaruh budaya barat di bidang pendidikan dan terlebih lagi dalam bidang hukum syari'ah. Al-Nabhani mengatakan:

“Di kalangan terdidik dan terpelajar telah terjadi penjajahan sebelum penjajahan yang sesungguhnya. Dan setelah merdeka dari penjajahan pu banyak sekolah yang masih menggunakan sistem pendidikan, budaya, falsafah, bahkan way of life Barat. Inilah yang kemudian menyebabkan kepribadian Barat telah menjadi asas yang mencabut budaya dari akar-akarnya yang asli sebagaimana ada

²⁰ Ibid hal 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam sejarah Barat dan Kebangkitannya yang telah menutup Rasionalitas Kita”²¹.

Dengan bekerja di lembaga pengadilan, Al-Nabhani menganggap bahwa bisa menjaga jarak dengan dunia pendidikan di Kementrian, dan ia juga merasa memiliki peluang yang besar untuk mempratiknya ilmu-ilmu yang dimilikinya dibidang hukum Syari’ah. Al-Nabhani begitu prihatin terhadap penerapan syari’at Islam yang menurutnya masih belum total do terapkan. Dalam pandangannya undang-undang kemasyarakatan Islam yang berkaitan antara hubungan laki-laki dan perempuan dengan semua derivasinya terutama yang terkait dengan hukum keluarga memang masih diterapkan. Tetapi hukum yang lain masih mengadopsi dari pada sistem hukum Kafir²².

Atas bantuan teman-temannya yang lebih dahulu bekerja, al-Nabhani bisa bekerja di pengadilan di Baisan. Selanjutnya ia berpindah ke Thabriya. Karir al-Nabhani terus merangkak naik. Berkat kesungguhan, keuletan dan kemampuan yang dimilikinya, dia kemudian diangkat menjadi Panitera Mahkamah Syari’ah di Haifa. Kemudian memasuki tahun 1940 hingga tahun 1945 ia diangkat menjadi asisten hakim. Hingga diakhir karirnya sebagai asisten hakim dia di pindahkan ke Ramallah menjadi Hakim di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948, dan ditahun itu juga setelah Palestina jatuh ketangan Israel al-Nabhani memutuskan untuk pindah ke Syria²³.

²¹ Ibid hal 102

²² Ibid hal 102

²³ Ibid WWW.Tempo.Co.Id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sewaktu tinggal di Syria al-Nabhani mendapatkan surat dari temannya Anwar al-Khatib, agar ia kembali ke Palestina sebagai Hakim Syar'iyah di Al-Quds, ia memenuhi permintaan temannya hingga selanjutnya beliau diangkat menjadi anggota Mahkamah Banding hingga Tahun 1950. Kemudian selanjutnya al-Nabhani mengajukan surat pengunduran diri karena ingin mencalonkan diri menjadi anggota dalam Majelis Perwakilan Yordania sebagai calon dari daerah al-Quds, namun ia tidak terpilih menjadi Anggota Majelis Perwakilan Yordania dan kemudian menjadi dosen di Kuliyah Ilmiyyah Islamiyyah²⁴.

Setelah tidak lagi aktif menjadi hakim al-Nabhani mendatangi Amman pada tahun 1951. Sejak awal kedatangannya hingga tahun 1953 al-Nabhani sering menyampaikan ceramah kepada para pelajar di jenjang menengah di fakultas keislaman. Pengalaman hidup al-Nabhani yang penting dan kelak memberikan pengaruh terhadap perkembangan gerakan islam di seluruh dunia ialah ketika ia mendirikan partai politik yang diberi nama Hizbut Tahrir al-Islamiyah pada tahun 1953. Namun permohonan pendaftaran partainya ditolak oleh pemerintah Yordania karena dianggap mengancam stabilitas Negara²⁵.

Dunia politik bukanlah hal baru bagi al-Nabhani, hal tersebut dikarenakan sejak remaja al-Nabhani telah bersinggungan dengan dunia politik karena pengaruh kakeknya. Ia sering diajak kakeknya untuk mengikuti sejumlah pertemuan dengan berbagai tokoh lainnya yang juga sama-sama anti barat serta memiliki semangat akan bangkitnya Khilafah Ustmaniyyah. Selain itu semasa kuliah di Dar-ul al-Ulum keterlibatannya dalam berbagai diskusi dengan ulama di mesir yang terus berlanjut hingga ia bekerja pada pengadilan Palestina, dan turut memberikan kontribusi.

²⁴ Azman, Loc.Cit, hal. 102

²⁵ Azman, Op.Cit, hal. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tema membangkitkan kembali ummat islam dari keterpurukan, kritis akan undang-undang Arab yang berbau Barat, hingga ide untuk mendirikan partai politik adalah tema yang sering beliau diskusikan dan juga di sosialisasikan lewat mimbar-mimbar Khutbah. Tanggapan yang ia dapat ada positif dan ada juga yang berbentuk ancaman yang salah satunya datang dari Raja Yordania Abdullah ibn al-Hussain. Hingga akhirnya al-Nabhani di deportasi ke Negara asalnya²⁶.

Peristiwa terakhir inilah yang menjadi penyebab tergugahnya al-Nabhani untuk terjun secara langsung ke dalam dunia politik secara total, dengan cara mengundurkan diri dari lembaga peradilan yang telah ia tekuni dan juga yang telah membesarkan namanya sejak lama, untuk kemudian mendaftarkan diri sebagai calon anggota dewan perwakilan Yordania yang gagal di gapainya. Namun meskipun demikian aktivitas politiknya tidak surut hal tersebut dapat dilihat dari tekatnya membentuk Hizbut at-Tahrir al-Islami di tahun 1953 dan al-Nabhani wafat pada 25 Rajab 1398 H atau bertepatan pada 20 Juni 1977 M. Meskipun al-Nabhani telah wafat namun pengaruh dirinya terhadap Hizbut Tahrir sangat kuat sehingga Hizbut Tahrir selalu diidentikkan dengan dirinya²⁷.

2. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan oleh al-Nabhani dengan landasan Nash disertai keprihatinannya terhadap realitas yang dihadapi kaum muslimin diseluruh dunia, khususnya masyarakat muslim yang berada di negara-negara Arab, yang tidak berdaya memerdekakan diri mereka sendiri dari intervensi negara Barat, pemimpin-pemimpin yang dianggap lemah hingga

²⁶ Ibid hal 103

²⁷ Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Kaum Fundamental : Pengalaman Hizbut al-tahrir Indonesia* (Malang: UMM, 2010) hal. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khufur, serta pola pikir kebangsaan yang dianggap al-Nabhani menyebabkan umat muslim didunia tidak bisa bersatu bahkan saling menyerang satu dengan yang lainnya.

Landasan nash didirikannya Hizbut Tahrir oleh al-Nabhani terdapat pada Q.S Al-Ma'idah : 48, 49, dan Q.S An-Nisa Ayat 59 dan Q.S. Al-Ma'idah Ayat 44.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمَنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۚ

Artinya : “Dan kami telah turunkan kepada mu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lomba lah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”²⁸. (Q.S. Al-Ma'idah ayat 48)

وَأِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “dan Hendaknya kamu memutus Perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu megikuti hawa nafsu mereka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang di turunkan Allah

²⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan (Karya Agung Surabaya: 2006), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah). Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan enimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik²⁹. (Q.S. Al-Ma'idah : 49)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulul amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama. (bagimu) dan lebih baik akibatnya³⁰ (Q.S An-Nisa : 59)

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا ۚ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan merek diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir³¹. (Q.S. Al-Ma'idah : 44)

²⁹ Op.Cit hal 198

³⁰ Op.Cit hal 198

³¹ Op.Cit hal 198

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disisi lain latar belakang sejarah dari al-Nabhani yang mendorongnya untuk mendirikan Hizbut Tahrir ialah upaya untuk membangkitkan kembali umat islam dari kemerosotan yang sangat parah, membebaskan umat islam dari ide-ide dan sistem, perundang-undangan dan hukum yang kufur, serta membebaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud untuk membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyyah di muka bumi, sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan kembali dengan apa yang turunan oleh Allah ³².

Sebab kemerosotan umat islam menurut Hizbut Tahrir disebabkan karena lemahnya kaum Muslim dalam memahami dan melaksanakan islam. Ini disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mengaburkan pemikiran dan penerapan islam secara total yang dialami sejak abad ke dua hijriah hingga saat ini. Adapun faktor-faktor yang paling menonjol yang menjadi andil dalam semakin merosotnya islam ialah :

1. Adanya upaya sebagian kaum muslim untuk mengkompromikan antara ajaran-ajaran islam dengan filsafat-filsafat asing seperti india, persia dan yunani. Yang akhirnya menimbulkan interpretasi yang menjauhkan hakikat islam yang sebenarnya.
2. Adanya manipulasi ajaran-ajaran islam yang bertujuan menjauhkan umat islam dari islam,
3. Diabaikannya bahasa arab dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam, padahal agama islam tidak mungkin dapat dipahami tanpa adanya pendidikan mengenai bahasa arab.

³² Ibid 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Serangan misionaris dan kebudayaan asing dan disusul dengan serangan politis negara-negara Barat yang berlangsung sejak abad ke tujuh belas yang bertujuan menjauhkan muslim dari islam dan berujung pada hancurnya islam.
5. Pudarnya Daulah Khilafah Islam dan menyusul berakhirnya sistem kekhalifahan islam pada tahun 1924 dan umat islam masuk kepada sistem politik yang disebut al-Nabhani dengan sistem kufur³³.

Sejarah Hizbut Tahrir Di Indonesia

Hizbut Tahrir sebagai gerakan di Indonesia dimulai pada masa 1982-1983 M. melalui M. Mustofa dan Abdurrahman Al-Baghdadi. M. Mustofa merupakan putra dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazali Bogor seorang ulama yang berpandangan Modern ialah Abdullah bin Nuh yang juga dikenal dengan panggilan “Mamak”. Mustofa adalah alumnus dari salah satu perguruan tinggi di Yordania sedangkan Abdurrahman berasal dari lebanon yang bermigrasi ke Australia dan akhirnya tinggal di Indonesia.

Selama belajar di Yordania Mustofa ikut aktif dalam gerakan dakwah bawah tanah Hizbut Tahrir disana. Pada mulanya keterliban mustofa dalam partai ini diawali dengan ketertarikannya pada buku-buku karangan Taqiyyuddin An-Nabhani sang pendiri Hizbut Tahrir. Mustofa telah diperkenalkan dengan salah satu buku An-Nabhani yang berjudul Peradaban Islam oleh ayahnya sendiri Abdullah bin Nuh sebelum ia berangkat ke Yordania pada tahun 1979. Seketika sampai di sana secara tidak sengaja

³³ Syamsul Arifin, Op.Cit hal. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mustofa bertemu dengan para penggiat aktivis Hizbut Tahrir dan mendapatkan buku-buku dari an-Nabhani secara lengkap disana. Pendalaman mengenai buku-buku Syekh Taqiyyuddin An-Nabhani membuatnya mengagumi pemikiran tokoh ini. Mustofa menganggap bahwa Taqiyyuddin An-Nabhani telah sampai kepada taraf Mujtahid Mutlaq. Ia adalah mujtahid besar abad ini dikarenakan istinbat al-ahkam (penggalian hukumnya) dan cara berfikir fiqhnya, khususnya dalam kitab al-Tafkir sama menariknya dengan imam Syafi'i. Selain hal tersebut ketertarikan Mustofa kepada gerakan ini ialah meskipun gerakan ini dibawah tekanan pemerintah Hizbut Tahrir tidak terprovokasi untuk menggunakan kekerasan apalagi mengangkat senjata. Kegiatan utama mereka menyebarkan pemikiran islam dan memperkuat aqiah dan ideologi islam di tengah-tengah umat, melalui berbagai forum halaqah. Maka kemudian mustofa ikut aktif dalam berbagai kegiatan dakwah pemikiran Hizbut Tahrir di Yordania ³⁴.

Sedangkan Abdurrahman Al-Baghdadi aktif digerakan Hizbut Tahrir di Lebanon sejak usia 15 Tahun. Ia berasal dari keluarga aktivis Hizbut Tahrir. Keluarganya pindah ke Australia dan menjadi warga negara Australia. Ia kemudian berkenalan dengan Abdullah bin Nuh ketika Abdullah menginap keluarga Abdurrahman selama berada di Australia untuk mengunjungi anaknya yang belajar disana. Dalam dialog dan diskusi intensif Abdullah Nuh Seorang Dosen senior di Universitas Indonesia itu terkesan dengan Al-Baghdadi yang saat itu masih berusia 25 tahun. Maka

³⁴ Azman, *Op.Cit*, hal. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selepasnya dari Australia Abdullah kembali ke Indonesia dengan mengajak Al-Baghdadi dan menjadikannya anak Angkat yang nantinya akan membantunya mengembangkan pesantren Al-Ghazali Bogor³⁵.

Pada saat mengajar di pesantren Al-Baghdadi berinteraksi dengan mahasiswa Institute Pertanian Bogor yang aktif mengembangkan kegiatan Al-Ghifari yang ada dikampus tersebut. ditengah-tengah interaksi Al-Baghdadi memperkenalkan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir kepada aktivis masjid tersebut³⁶.

Pada tahun 1982 Mustofa pulang dari Yordania dalam rangka cuti semester. Dalam kesempatan ini mustofa memperkenalkan dan mengajarkan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir kepada para mahasiswa Institute Pertanian Bogor tersebut yang memang mereka sudah sejak lama mengaji kepada ayahnya Abdullah bin Nuh dan memberikan kepada mereka buku-buku karya dari Hizbut Tahrir, yang pertama diperkenalkan dengan pemikiran ini kepada Fathul Hidayah yang mana ia merupakan seorang mahasiswa kemudian bersedia menjadi pelopor penggerak pada masa-masa awal. Hingga akhirnya menjadikan banyak mahasiswa tertarik kepada pemikiran Hizbut Tahrir dan meminta untuk membedah lebih jauh pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir tersebut. Beberapa waktu kemudian Mustofa diperkenalkan kepada Abdurrahman Al-Baghdadi oleh ayahnya Abdullah bin Nuh yang ternyata aktivis Hizbut Tahrir³⁷. Maka oleh Mustofa diperkenalkanlah Fathul Hidayah kepada Abdurrahman untuk selanjutnya

³⁵ Ibid hal 109

³⁶ Ibid hal 81

³⁷ Syamsul Arifin, Op.Cit, hal. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka menjalankan berbagai kegiatan Halaqah yang diadakan bersama mahasiswa Institute Pertanian Bogor lainnya yang diadakan baik di pesantren, di masjid maupun dirumah-rumah mahasiswa dengan narasumber Abdurrahman dan Mustofa yang juga merangkap sebagai penerjemah, hal tersebut dikarenakan Abdurrahman belum menguasai bahasa Indonesia³⁸.

Saat Mustofa harus kembali ke Yordania untuk meneruskan belajar maka kegiatan halaqah-halaqah, sosialisasinya serta pembangunan jaringannya diteruskan oleh Fathul Hidayah beserta rekan-rekannya dan kegiatan-kegiatan mereka berada dibawah bimbingan Abdurrahman Al-Baghdadi dibantu oleh Abas Aula dan Abdul Hannan yang mana mereka berdua merupakan alumnus dari Madinah³⁹.

Kepemimpinan Hizbut Tahrir Indonesia selanjutnya di jalankan oleh Muhammad Al-khathath dengan Ismail Yusanto sebagai juru bicara sepeninggal wafatnya Abdullah bin Nuh. Jumlah jemaah pengikut Hizbut Tahrir Indonesia kini tersebar pada 33 Provinsi di Indonesia dan di beberapa tempat penyebaran dari pada Hizbut Tahrir Indonesia sendiri sampai kepada Pedesaan⁴⁰.

Pemahaman Keagamaan Organisasi Hizbut Tahrir

Salah satu karakteristik nalar keagamaan kelompok islam militan adalah menggunakan pendekatan nalar literalis teks sebagai dasar pemikiran-pemikirannya. Pendekatan nalar literalis ini merupakan model pemikiran normatif bahwa semua yang ada dalam tatanan sosial kehidupan

³⁸ Ibid hal 110

³⁹ Ibid hal 110

⁴⁰ Azman, Op.Cit, hal. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun pemikiran harus berangkat dari teks suci dan mengesampingkan campur tangan nalar manusia untuk mengatur kehidupan dan pemikiran. Nalar literalis dan pemahaman tekstual terhadap Al-Qur'an dan Hadits akan perimplikasi pada ekspresi keberagaman dan bisa menjadi eksklusif. Dalam kelompok islam militan mempunyai keyakinan yang absolut bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang paling benar dan sistem yang dibangun dalam Islam merupakan aturan yang paling unggul dibandingkan sistem hukum produk manusia⁴¹.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nalar keagamaan Hizbut Tahrir adalah menolak Filsafat, Hurmenerik, paham sekuler, kapitalis, komunis dan paham-paham yang bertentangan dengan islam. Misalnya sikap kritis Hizbut Tahrir terhadap ekonomi dan kapitalisasi pendidikan dan pertanahan yang melanda indonesia. Taqiyyuddin al-Nabhani sudah menggariskan pemikiran yang kemudian dijadikan dasar perjuangan keagamaan. Al-Nabhani apapun pemikiran yang tidak bersumber dari islam harus ditolak dan sangat membahayakan umat islam, karena dasar yang harus ditegakkan menurut Hizbut Tahrir ialah Hukum Syara' yang tidak bercampur dengan interpretasi yang menyesatkan⁴².

Pemikiran al-Nabhani sangat anti filsafat dengan menyerang paham yang dianggap bertentangan dengan islam tersebut dijadikan dasar nalar keagamaan Hizbut Tahrir. Kecaman dan kritikan tidak hanya dilayangkan kepada filosof muslim namun juga kepada ulama yang mendukung

⁴¹ Ibid hal 111

⁴² Azman, Ibid, hal. 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran islam liberal. Menurut Hizbut Tahrir langkah yang paling mendesak untuk merubah masyarakat islam ialah memperbaiki pemikiran islam, al-Nabhani mengajak kepada umat islam untuk kembali kepada pemikiran yang orasional yaitu pemikiran yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Metode pemikiran Islam bagi Hizbut Tahrir dijadikan sebagai Saqafah untuk model berpikir islami⁴³.

B. Front Pembela Islam

1. Latar belakang berdirinya Front Pembela Islam (FPI)

Front Pembela Islam (FPI) merupakan suatu organisasi islam yang muncul akibat berkurangnya peranan negara yang berdampak padahilangnya tertib hukum atau penerapan hukum dimasyarakat. FPI berdiri secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1998, bertepatan dengan 24 Rabiuts Tsani 1419 H, di Pondok Pesantren Al-Umm, Kampong Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. FPI didirikan oleh sejumlah Haba'ib atau Habib, Ulama, Mubaligh, serta aktivis muslim dan umat islam. Tokoh yang sangat melopori berdiri nya FPI ialah Habib Rizieq Shihab. Sebagai sebuah organisasi gerakan, para aktivis ini telah melakukan berbagai aktivitas keagamaan seperti tabligh akbar, audensi, silahturahmi dan juga demonstrasi. FPI merasa memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam memberikan kontribusi positif untuk kemajuan bangsa⁴⁴.

Front Pembela Islam (FPI) ketika berdiri juga merencanakan deklarasir nasional anti maksiat pada saat deklarasi berdirinya FPI pada

⁴³ Azman, Ibidi hal 111

⁴⁴ Shihab, *Dialog FPI-Ammar Ma'ruf Nahi Munkar*, 90



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 17 Agustus Milladiyah, berbagai kritik, kecaman, tuduhan, tudingan bahkan fitnah kerap kali dilontarkan kepada FPI. Berbagai ujia dan cobaan menghantam FPI dan aktivisnya. Pada tanggal 22 November 1998 M, terjadi Tragedi Ketapang, yang menyeret FPI kedalam tragedi berdarah yang mengheboh kan masyarakat dunia.

Dan pada tanggal 11 April 1999 M, Habib Riqzieq selaku Ketua Umum FPI ditembak oleh orang yang tidak dikenal, dan dengan pertolongan Allah S.W.T, Habib Rizieq selamat dari usaha percobaan pembunuhan tersebut.

Sedangkan ditanggal 23 Juli 2000 M, Habib Sholeh Alattas, salah seorang penasehat DPP-FPI, terbunuh ditembak oleh orang yang sama sekali tidak dikenal didepan halaman rumahnya, usai menunaikan dan mengimami sholat shubuh berjamaah di masjid.

Esoknya, tanggal 24 Juli 2000 M sore hari, KH. Cecep Bustomi salah seorang deklator FPI, ketika keluar dari markas group 1 kopasus di Serang, usai bertemu Wakil Komandan Group 1, dikejar sejumlah orang tidak dikenal dengan mengendarai motor Trail, sambil terus membrondong tembakan hingga pasar Rawu, Serang Banten. Akhirnya beliau pun KH. Cecep Bustomi tewas mengenaskan. Sampai di tahun 2000 inilah terjadi penangkapan besar-besaran terhadap aktivis FPI diberbagai wilayah. Bahkan pada tanggal 11 Desember 2000 M, menjelang sahur, aparat kepolisian dengan sangat brutal menembaki tim monitoring laskar FPI pusat. Sepanjang jalan S. Parman Katamso – K.S Tubun. Penembakan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilatar belakangi oleh kekecewaan dan sakit hati sejumlah Oknum Kepolisian, karena lahan setoran judinya diserang salah satu posko laskar FPI di wilayah Jakarta Barat⁴⁵.

Dua hari kemudian, pada tanggal 17 Ramadhan 1421 H/ 13 Desember 2000 M, Habib Sholeh Al-Habsyi, Ketua Majelis Syuro Jawa Barat diserang sekelompok preman, di kediamannya, kediamannya dibakar dan dijarah. Beliau dan keluarga berhasil meloloskan diri⁴⁶.

Puncaknya pada tanggal 28 Ramadhan 1421 H/ 24 Desember 2000 M, malam Natal, di SCTV lewat suatu acara dialog dengan Presiden RI ke 4 yang didampingi dan dipandu oleh salah seorang presenter SCTV. Presiden menyatakan bahwasanya FPI harus dibubarkan karena melanggar hukum, mendirikan Negara didalam Negara dan mengganggu kesejahteraan dan kedamaian rakyat. Batas waktu yang diberikan adalah sampai akhir Januari 2001⁴⁷.

Menurut Habib Rizieq lahirnya FPI tidak lepas dari menurunnya peran Negara yang berdampak pada hilangnya tertib hukum di tengah masyarakat Indonesia. Banyak peraturan pemerintah yang dilanggar oleh masyarakat, termaksud disini adalah mengenai judi dan kemaksiatan. Pada era reformasi, pemerintah tidak dapat mengendalikan terjadinya tindak kemaksiatan, seperti perjudian, narkoba, minuman keras dan beroperasinya tempat-tempat maksiat secara terbuka. Oleh karena itu, FPI

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Shihab, Dialog *FPI-Ammar Ma'ruf Nahi Munkar*,90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkewajiba mengambil inisiatif membantu pemerintah untuk memerangi kemaksiatan tersebut⁴⁸.

Al-Zastrouw Ng mengatakan latar belakang berdirinya FPI tak lepas dari situasi politik-sosial antara lain;

- 1) Adanya penderitaan panjang yang dialami umat muslim di Indonesia sebagai akibat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa,
- 2) Kegagalan aparat Negara untuk menegakkan hukum dan menjamin ketertiban masyarakat,
- 3) Adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat islam,
- 4) Adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menegakkan Amar Makruf Nahi Munkar. Tampaknya latar belakang berdirinya FPI tidak bisa lepas dari peristiwa Reformasi sebagai momentum perubahan sosial dan politik di Negara Indonesia⁴⁹.

FPI berdiri untuk melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut hukum syara' dan hukum akal. Sedangkan Nahi Munkar adalah mencegah setiap kejahatan/kemungkaran, yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh syara' dan hukum akal. Dalam mencapai tujuan Amar Ma'ruf, FPI mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah mengajak dengan hikmah

⁴⁸ Shihab, *Dialog FPI-Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, 89.

⁴⁹ Al-Zastrouw, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kebijaksanaan, lemah lembut). Memberi mau'idzah hasanah (nasehat yang baik), dan berdiskusi dengan cara yang sangat terbaik. Sedangkan dalam melakukan Nahi Munkar, FPI mengutamakan sikap yang tegas melalui langkah-langkah menggunakan kekuatan/kekuasaan bila mampu dan menggunakan lisan dan tulisan, bila kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan maka nahi munkar dilakukan dengan menggunakan hati yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk kemungkaran⁵⁰.

2. Format Kepemimpinan, Struktur dan Kekuasaan Dalam FPI

- 1) Kepemimpinan, Struktur dan Kekuasaan Dalam FPI
 - a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ditingkat pusat terdiri dari Imam Besar, Majelis Syura dan Dewan Tanfidzi.
 - b. Dewan Pimpinan Luar Negri (DPLN) di Luar Negri terdiri dari Imam, Majelis Syura Dewan Tanfidzi.
 - c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Provinsi terdiri dari Imam, Majelis Syura Dewan Tanfidzi.
 - d. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat kota/Kodya/Kabupaten adalah Dewan Tanfidzi Wilayah.
 - e. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan adalah Dewan Tanfidzi Cabang.
 - f. Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) di tingkat Kelurahan/Desa adalah Tanfidzi Kelurahan

⁵⁰ Shihab, *Dialog FPI-Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Pengurus Inti:

1. Pengurus Inti Majelis Syura Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinn Daerah adalah:

Seorang Ketua, Seorang Sekretaris, lima orang Ketua Majelis Tinggi Front, yaitu: Majelis Syari'at, Majelis Pembina, Majelis Penasehat, Majelis Pengawas, dan Majelis Kehormatan, yang beranggotakan sekurang-kurangnya 33 orang dan paling banyak 99 orang.

2. Pengurus Inti Dewan Tanfidzi di Tigkat Pusat ialah:
3. Seorang Ketua Umum, Seorang Wakil Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, beberapa orang Wakil Sekretaris Umum, dan beberapa Wakil Bedahara Umum.
3. Pengurus Inti Dewan Tanfidzi di tingkat selain Pusat ialah:
Seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara.

h. Organisasi FPI memiliki lima badan khusus yaitu:

1. BIF: Badan Investigasi Front

BIF bertugas untuk melakukan investigasi terhadap berbagai persoalan yang berdampak buruk terhadap islam dan FPI.

BIF memiliki dua devisi.

- a. Devisi Intelijen.

Devisi ini bertugas melakukan pengawasan secara rahasia terhadap segala aktivitas yang merugikan Islam dan FPI.

- b. Devisi Pencari Fakta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Devisi ini bertugas untuk mencari dan menghimpun berbagai fakta dan data untuk membuktikan keakuratan intelijen FPI.

2. BTF: Badan anti Teror Front

Ancaman, intimidasi dan berbagai teror hampir setiap saat menghampiri setiap aktivitas FPI. Dalam hal ini BTF memainkan peranan penting untuk mengantisipasi, menghadapi dan melawan segala bentuk teror tersebut. BTF bekerja sama dengan BIF untuk melakukan “kontra teror” maupun “kontra intelijen” terhadap musuh-musuh Islam yang melakukan teroro ataupun penyusupan ke dalam aktivitas umat Islam.

3. BPF: Badan Pengkaderan Front

BPF adalah badan khusus yang bertanggung jawab menangani sistem pengkaderan FPI badan inilah yang mengelola pembinaan, pendidikan, dan pelatihan para kader FPI.

4. BAF: Badan Ahli Front

BAF adalah laboratorium strategi FPI dalam pengkajian persoalan kehidupan dan di segala sektor keilmuan. Di BAF inilah para pakar FPI dari berbagai disiplin ilmu berkumpul. Ke depan diharapkan BAF mampu menjadi titik terang bagi FPI, bahkan kehidupan masyarakat secara umum.

5. BAZ: Badan Amil Zakat

BAZ adalah badan yang bertugas untuk penyuluhan dan menyadarkan akan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai Syari'at Islam. Serta mengadakan rekrutmen keanggotaan wajib zakat secara tetap dan membangun informasi, pengelolaan zakat yang profesional dan terintegrasi⁵¹.

i. Organisasi FPI memiliki lima Lembaga Otonom yaitu:

1. PMF: Lembaga Pemantau Ma'siat Front

Lembaga ini bertugas sebagai pemantau independen terhadap aktivitas kemaksiatan di Indonesia. Khususnya, terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengusaha masiat dan para pelingdungnya dari kalangan pejabat Negara, termaksud aparat keamanan

2. LDF: Lembaga Dakwah Front

LDF adalah wadah silaturahmi para Muballigh/ Da'i FPI, sekaligus sebagai pusat pengembangan da'wah islam yang di Programkan FPI. LDF memiliki dua fungsi, internal dan eksternal. Fungsi internal adalah mensosialisasikan da'wah dikalangan aktifis FPI, termasuk pembinaan mental spiritual dan pengembangan Sumber Daya Da'wah yang dimiliki FPI. Sedangkan fungsi eksternalnya adalah mensosialisasikan da'wah islam ditengah masyarakat.

3. LEF: Lembaga Ekonomi Front

Tugas LEF adalah membangun ekonomi FPI agar tidak menjadi organisasi yang lemah. Untuk itu, LEF berkewajiban

⁵¹ Shihab, Dialog *FPI-Ammar Ma'ruf Nahi Munkar*, 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan terobosan-terobosan bisnis yang berprospek, sehingga kedepan FPI mampu memiliki “Profit Center” yang ditangguh untuk mendanai perjuangan Amar ma’ruf nahi munkar.

4. BHF: Lembaga Bantuan Front

BHF telah menunjukkan eksistensinya sebagai Lembaga Bantuan Hukum FPI, sejak FPI berdiri hingga kini tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih secara terus menerus melakukan litigasi advokasi untuk aktivitas FPI⁵².

5. HILMI: Lembaga Kemanusiaan Front

Bernama Hilal Merah Indonesia. HILMI adalah relawan untuk tugas-tugas kemanusiaan dalam bencana kemanusiaan dan bencana alam.

- j. Organisasi FPI memiliki empat Anak Organisasi yang otonom dan independen serta memiliki AD/ART, Struktur organisasi, garis komando, program kerja dan pertanggung jawaban sendiri, yaitu:

1. Laskar Pembela Islam (LPI)

LPI adalah barisan pemuda FPI yang menjadi satuan tugas organisasi dengan fungsi serba guna, Struktur kepemimpinan LPI berdasarkan jabatan dan kepangkatan yang ditentukan mulai karir dan prestasi para anggotanya. Pemimpin LPI di tingkat Nasional disebut Imam Besar Laskar. Di tingkat Provinsi disebut dengan sebutan Imam Laskar. Di tingkat Kecamatan disebut Qoid Laskar.

⁵² Ibid 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di tingkat Kelurahan/Desa disebut Amir Laskar. Di tingkat Front (regu) disebut dengan Rois Laskar.

2. Mujahidah Pembela Islam (MPI)

MPI adalah barisan muslimat FPI selama aktivitas masih terfokus kepada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Namun demikian, tidak jarang MPI ikut melibatkan diri secara aktif dalam berbagai aksi damai FPI. Kehadiran MPI sebagai sayap FPI dimaksudkan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi serta semangat amar ma'ruf nahi munkar para kaum wanita islam⁵³. Misi utamanya adalah memperjuangkan kaum wanita agar berada pada posisi yang mulai dan terhormat didunia dan akhirat.

3. Serikat Pekerja Front (SPF)

SPF adalah perhimpunan para anggota FPI yang bekerja sebagai buruh/pegawai karyawan di berbagai pabrik dan perusahaan. Untuk pertama kalinya DPP-FPI mencanangkan dan mendeklarasikan SPF diwilayah Tanggerang atas desakan para aktivis FPI Tanggerang yang kebanyakan berasal dari kalangan buruh pabrik.

4. Front Mahasiswa Islam (FMI)

Sejumlah mahasiswa yang selama ini aktif di kelaskaran FPI berkeinginan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bukan saja secara fisik. Namun mereka juga ingin beramar ma'ruf nahi

⁵³ Ibid 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munkar dengan kemampuan intelektual yang dimilikinya, sehingga wawasan akademiknya tidak mubadzir. Akhirnya, digulirkan ide pembentukan FMI. FMI tersebut dirintis oleh mahasiswa FPI, namun pada perkembangannya selanjutnya FMI lebih mandiri dan mulai dimintai mahasiswa dari berbagai kalangan⁵⁴.

2) Struktur Dewan Pimpinan Pusat

Dewan Pimpinan Pusat FPI terdiri dari:

1. Imam Besar : sebagai Pemimpin Tertinggi,
2. Majelis Syura yang dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh Sekretaris dan 5 (Lima) orang Ketua Dewan Tinggi Front yaitu:
 - b. Dewan Syariat
 - c. Dewan Pembina
 - d. Dewan Penasihat
 - e. Dewan Pengawas
 - f. Dewan Kehormatan.
3. Dewan Tanfidzi yang dibantu oleh seorang Ketua Umum yang dibantu oleh beberapa orang Ketua dan Sekretaris Umum yang dibantu juga oleh beberapa Wakil Bendahara Umum dan Badan Khusus.

3) Kekuasaan Organisasi

Kekuasaan tertinggi organisasi FPI adalah Musyawarah, sesuai tingkat kepemimpinan organisasi:

⁵⁴ Abdullah Bin Yahya Al- Haddad, *dialog*, Pasuruan, 1 Juli 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Musyawarah ditingkat Nasional terdiri dari Musyawarah Nasional (MUNAS), Musyawarah Nasional luar Biasa (MUSLUB), Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) dan Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS).
- b. Musyawarah di tingkat Luar Negri adalah MLN yang pesertanya adalah IMAM dan semua pengurus Dewan Pimpinan Luar Negri yang kekuasaannya akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga yang diselenggarakan setiap 5 Tahun sekali oleh Dewan Pimpinan Luar Negri⁵⁵.
- c. Musyawarah ditingkat Daerah terdiri dari Musyawarah Daerah (MUSDA), Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) Musyawarah Kerja Daerah (MUSPIMDA), yang kekuasaannya lebih lanjut akan diatur dalam anggaran Rumah Tangga.
- d. Musyawarah di tingkat Wilayah terdiri dari Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB), Musyawarah Kerja Wilayah (MUSPIMWIL) yang kekuasaannya lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- e. Musyawarah di tingkat Cabang adalah Musyawarah Cabang (MUSCAB), diselenggarakan 4 Tahun sekali oleh DPC, yang pesertanya adalah seluruh pengurus DPC-FPI, dan para ketua dan sekretaris Dewan tiap-tiap DPRa-FPI serta 1 orang UTUSAN

⁵⁵ Ibid 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPD FPI setempat, yang kekuasaannya lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga⁵⁶.

- f. Musyawarah di tingkat Ranting adalah Musyawarah Ranting (MUSRAN), diselenggarakan setiap 3 Tahun sekali oleh DPRa, yang pesertanya adalah seluruh pengurus DPRa-FPI, dan Para Anggotanya FPI di Ranti Tersebut serta utusan DPW-FPI setempat, yang kekuasaannya lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- g. Pimpinan Sidang MUNAS, MLN, MUSDA, MUSWIL, MUSCAB, MUSRAN adalah Dewan Pimpinan periode berjalan di Tiap Tingkatan⁵⁷.

3. Standart Operasional Prosedur (SOP) Hisbah.

Front Pembela Islam sebagai ormas yang focus dalam amar ma'ruf nahi munkar mempunyai gerakan yang sistematis. Dalam setiap tindakan dan sikap yang diambil FPI manapun harus memenuhi syarat prosedur standart yang telah ditentukan organisasi. Berikut langkah-langkah penanganan tempat maksiat / SOP amar ma'ruf nahi munkar:

1. Harus adanya laporan dari masyarakat akan adanya tempat maksiat.
2. Jika dirasa laporan tersebut dinilai sudah memenuhi persyaratan dalam artian adanya laporan dari masyarakat lain dengan tempat maksiat yang sama.

⁵⁶ Ibid 92

⁵⁷ Pedoman Front Pembela Islam (AD/ART)2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. FPI akan mengirim badan khusus yakni Badan Investigasi Front untuk menyelidiki tempat maksiat tersebut dan nantinya akan disusul kepada laporan kepada DPW dan DPD tentang medan tempat maksiat.
4. Menentukan medan tempat maksiat tersebut dengan melihat dari keberpihakan warga dan masyarakat terhadap adanya tempat maksiat.
5. Opsi pertama, jika memnag warga dan masyarakat masih mendukung tempat maksiat, maka dari pihak FPI dilarang menggunakan medan amar ma'ruf nahi munkar. Melainkan medan yang digunakan adalah dakwah dengan mengirim da'i-da'i untuk dilakukan langkah penyadaran kepada masyarakat.
Opsi kedua, jika masyarakat menolak dengan adanya tempat maksiat tersebut, maka dari pihak FPI menindak lanjut dengan berkordinasi dengan pihak berwenang⁵⁸.
 - a. Kirim kan surat protes dan tuntutan pertama ke Lurah setempat dengan tembusan kepemilik/pengusaha tempat maksiat tersebut, Binnmas, Babinsa, dan Ulama kelurahan setempat, serta ke Mabes LPI sebagai laporan dan pemberitahuan.
 - b. Bila setelah satu minggu/satu bulan tidak ditanggapi, maka di kirimkan surat protes dan tuntutan kedua ke Camat dengan tembusan ke pemilik/pengusaha tempat maksiat tersebut, Kapolsek, Danramil, dan Ulama kecamatan setempat. Serta Mabes LPI sebagai laporan dan pemberitahuan (dilampirkan satu surat pertama).
 - c. Bila setelah satu minggu/satu bulan tidak ditanggapi maka di kirimkan surat protes dan tuntutan ketiga ke Walikota/Bupati

⁵⁸ Pedoman Front Pembela Islam (AD/ART)2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tembusan kepemilik/pengusaha tempat maksiat tersebut, DPRD tk. II, Kapolres, Dandim dan Ulama Kotamadya/Kabupaten. Setempat serta Mabes LPI sebagai Laporan dan pemberitahuan (dilampirkan satu surat pertama dan Kedua).

- d. Bila setelah satu minggu/satu bulan tidak ditanggapi, maka dikirimkan surat Protes dan Tuntutan akhir (Ultimatum) ke Gubernur dengan tembusan kepemilik/pengusaha tempat maksiat tersebut, DPRD tk I, Kapolwil, Kapolda, Danrem, Pangdam dan Ulama Provinsi tersebut. Serta Mabes LPI sebagai laporan dan pemberitahuan (dilampirkan satu surat pertama, kedua dan ketiga).
- e. Bila setelah satu minggu/satu bulan tidak pula ditanggapi, maka libatkan masyarakat setempat untuk mengambil insiatif lain dalam upaya menutup tempat maksiat tersebut, yang dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi dengan Mabes LPI dan Aparat Pemerintah/keamanan yang berwenang⁵⁹.

4. Faham Keagamaan Front Pembela Islam (FPI)

Sebagaimana yang sudah diatur dalam AD/ART Front Pembela Islam bahwasanya organisasi FPI beraqidahkan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah, bermahzab aqidah Asy'ary dan bermahzab fiqih Asy-syafi'i.

Kami dengan NU dan Muhammadiyah sama-sama Ahlu Sunnah Wal Jama'ah, penganut dari 4 yang telah disepakati yakni Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali.

Akan tetapi, dijelaskan dalam buku Ja'far Umar Thalib, bahwa aswaja yang dipahami oleh FPI tidaklah sama dengan yang difahami oleh

⁵⁹ Shihab, *Dialog FPI-Amar Makruf Nahi Munkar*, 720.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan NU maupun Muhammadiyah. Aswaja yang dipahami para aktivis FPI lebih mendekati pemahaman Aswaja menurut kelompok Salafi yang dipimpin oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib di Yogyakarta. Menurut kelompok ini, Aswaja adalah mereka yang telah disepakati untuk berpegang dengan kebenaran yang pasti sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadist dan mereka itu adalah para sahabat dan Tabi'in (Orang yang belajar dari sahabat dalam pemahaman dan pengambilan ilmu⁶⁰

⁶⁰Ja'far Umar Thalib, Mengenal Sejarah dan Pemahaman Ahlusunnaah Wal Jama'ah (Yogyakarta:Yayasan Assunnah, 1995),14



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

NEGARA HUKUM, NEGARA HUKUM DALAM ISLAM, TEORI DEMOKRASI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

A. Negara Hukum

1. Gagasan Negara Hukum

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam perubahan Keempat Tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Maka dari pada itu jargon yang digunakan untuk prinsip Negara Hukum adalah “*The Rule Of Law, Not Of Man*” yang disebut pemerintah pada pokoknya hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari Skenario sistem yang mengaturnya⁶¹.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan dan dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur,

⁶¹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, perlu sistem hukum dibangun (*Law Making*) dan ditegakkan (*Law Enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tinggi (*The Supreme Law Of The Land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai “*The Guardian*” dan sekaligus “*The Ultimate Interpreter Of The Constitution*”⁶².

2. Konsep Negara Hukum Kontemporer

Gagasan, cita, atau ide Negara hukum, selain terkait dengan konsep “*Rechtsstaat*” dan “*The Rule Of Law*”, juga berkaitan dengan konsep “*nomocracy*” yang berasal dari perkataan “*nomos*” dan “*cratos*”. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan “*demos*” dan “*cratos*” atau “*kratien*” dalam demokrasi. “*Nomos*” berarti norma, sedangkan “*cratos*” adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Dalam istilah yang dikembangkan oleh A.V Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “*Rule Of Law*” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “*The Rule Of Law, and Not Of Man*”. Yang

⁶² Ibid hal 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “*Namoi*” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*The Laws*”, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*Rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule Of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*Rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting yaitu:

- a) Perlindungan hak asasi manusia
- b) Pembagian kekuasaan
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d) Peradilan tata usaha negara⁶³.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule Of Law*”, yaitu:

- a) Supremacy of Law
- b) Equality before the law
- c) Due Process of Law

⁶³ Ibid hal 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat prinsip “rechtsstaat” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “Rule of Law” yang dikembangkan oleh A.V Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and impartiality of judiciary*) yang dizaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi⁶⁴. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- a) Negara harus tunduk pada hukum
- b) Pemerintah menghormati hak-hak individu
- c) Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*Human Dignity*)
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat

⁶⁴ Ibid hal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“predictable”. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undang, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi
 - e. Asas non-liqueur, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undang tidak ada atau tidak jelas
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlingkungannya dalam UUD
3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality Before The Law)

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara⁶⁵.

⁶⁵ Ibid hal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.⁶⁶

Cita Negara Hukum Indonesia

Dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini, menurut pendapat saya, kita dapat merumuskan kembali adanya tiga-belas prinsip pokok (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang.

1. Supremasi Hukum

Adanya pengakuan Normatif dan Empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normative mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakat bahwa hukum itu memang “*supreme*”

2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara

⁶⁶ B. Arief Shidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal. 124-125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *'affirmative actions'* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *'affirmative actions'* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adapt tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita atau pun anak-anak terlantar.

3. Asas Legalitas (Due Process of Law)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*Due Process of Law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *'rules and procedures'*⁶⁷. Prinsip normative

⁶⁷ Ibid hal 124

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban.

4. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

5. Organ-Organ Campuran Bersifat Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, dizaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat 'independent' seperti bank sentral, organisasi tentara dan organisasi kepolisian. Independen lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melaenggengkan kekuasaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatannya (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi)⁶⁸.

Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh

⁶⁸ Ibid hal 124

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa⁶⁹.

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi maka harus ada maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

8. Peradila Tata Usaha Negara (Constitutional Court):

Disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya, baik dengan pelembagaannya yang berdiri sendiri diluar dan sederajat dengan Mahkamah Agung ataupun dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan Mahkamah

⁶⁹ Ibid hal 125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agung yang sudah ada sebelumnya. Pentingnya peradilan ataupun mahkamah konstitusi ini adalah dalam upaya memperkuat sistem '*checks and balances*' antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi pengujian konstiusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutuskan berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antara lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Adanya perlindungan konstiusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyaratkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai cir yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyangang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi⁷⁰.

10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat):

Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan

⁷⁰ Ibid hal 125

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup ditengan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum tidak dimaksudkan hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali.

11. Berfung Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat):

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*Democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*Nomocrasy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum⁷¹.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial:

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan.

⁷¹ Ibid hal 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Khusus mengenai cita Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan kita dapat dilepaskan pula dari Nilai Ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Karena itu, disamping ke 12 ciri atau unsur yang terkandung dalam gagasan Negara Hukum Modern seperti tersebut diatas, unsur ciri yang ke 13 adalah bahwa Negara Hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha Esaan dan ke-maha Kuasa-an Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai ke-Maha Kuasa-an Tuhan yang Maha Esa yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam pancasila⁷²

B. Negara Hukum Dalam Islam

1. Negara Hukum Dalam Islam, Problem Penerapan Syari'at Islam

Konsep Negara Hukum berarti negara yang berdasarkan dan diatur oleh hukum, konsep *rule of law* diatas, sehingga jika diterapkan dalam hukum islam, berarti negara yang menerapkan syariat Islam⁷³.

a. Problem Epistemologis

Hukum Islam merupakan hukum Tuhan, namun dalam pembentukannya hukum islam dirumuskan oleh para fuqaha (ahli hukum Islam). Hal ini dapat menyebabkan konflik dasar antara wahyu Tuhan atau akal manusia (pemikiran fuqaha). Sejak masa pembentukan hukum

⁷² Kasil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

⁷³ Rahman, Fazlur 1995. *Islam dan Modernitas: sebuah Transformasi intelektraal*, ahli Bahasa Ahsin Muhammad, cet 2. Bandung : Pustaka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

islam, terdapat perbedaan pendapat tentang apakah hukum islam hanya bersumber dari wahyu atau akal juga berperan dalam memahami hukum islam. Perbedaan pendapat yang terjadi kemudin di era sekarang ini tentang apakah hukum islam sebagai hukum islam bersifat sakral dan tidak dapat dirubah, atau kan dapat berubah sesuai dengan perubahan permasalahan, waktu dan tempat serta perkembangan zaman. Di sisi lain, pandangan masyarakat indonesia terhadap hukum islam yang telah dilegislasikan menjadi hukum perundang-undangan juga bervariasi. Pandangan *pertama*, tidak mengakui undang-undang tersebut sebagai aturan yang menggantikan hukum fiqh, karena hukum islam bagi mereka adalah apa yang ditulis dalam kitab-kitab fiqh. *Kedua*, mengakui undang-undang tersebut sebagai undang-undang yang harus dipatuhi dalam kedudukannya sebagai warga negara, dan dalam waktu yang sama sebagai orang yang beragama islam tetap mengakui dan menjalankan aturan fiqh. Mereka mengatakan, “Perkara ini sah menurut agama, meskipun menyimpang dari ketentuan peraturan negara”. Misalnya tentang pencatatan perkawinan. *Ketiga*, menganggap undang-undang tersebut sebagai undang-undang negara yang sah mengatur umat islam, dan itu merupakan fiqh Indonesia⁷⁴.

b. Problem Metodologis

Berdasarkan perbedaan epistemologis diatas, berimplikasi terhadap perbedaan metodologis. Bagi golongan yang berpandangan

⁷⁴ Kasil, CST Loc. Cit 1989 hal 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa hukum islam hanya bersumber dari wahyu Tuhan, akan melihat sumber hukum adalah *nash* dan metode penemuan hukumnya cenderung tekstual dan kebahasaan. Sedangkan golongan yang berpandangan bahwa tidak cukup hanya melihat nash secara tekstual kemudian mengembangkan model-model penafsiran selain metode kebahasaan.

Perbedaan ini telah ada sejak awal masa pembentukan hukum islam yaitu dengan adanya pemahaman terhadap dhahir nash dan pemahaman terhadap apa impliti dari nash, seperti dalam peristiwa Bani Quraidhah tersebut diatas. Pada masa perkembangan mazhab-mazhab fiqh juga terdapat perbedaan metode istimbat hukum⁷⁵.

c. Problem Politis

Formalisasi hukum islam atau dengan kata lain, untuk menerapkan hukum islam disuatu negara memerlukan kekuatan-kekuatan politik yang akan mendukungnya, Di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Continental, pemberlakuan hukum melalui proses legislasi oleh badan legislatif. Karenanya, diperlakukan anggota-anggota legislatif yang akan memperjuangkan pemberlakuan hukum Islam.

Dalam konteks Indonesia pasca orde baru ini, problem politis dalam penerapan hukum islam adanya polarisasi aspirasi partai-partai Islam dalam penerapan hukum Islam serta adanya persaingan antara

⁷⁵ Rahman, Fazlur Loc.Cit 1995 hal 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik aliran (terutama antara kelompok nasionalis dan Islamis) di badan eksekutif. Di era multipartai, partai-partai ini dapat dipetakan menjadi partai nasionalis dan partai yang berbasis agama (Islam dan Kristen), dalam kaitan ini partai Islam. Islam hanya beberapa dari seluruh partai di Indonesia, namun tidak terjadi kesepahaman dalam aspirasi penerapan syari'at Islam ini⁷⁶.

2. Strategi Alternatif Penerapan Syari'at Islam di Indonesia

Dengan melihat peta pemikiran dan aspirasi tentang penerapan syari'at Islam di Indonesia tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya mayoritas partai Islam menginginkan penerapan syari'at Islam di Indonesia dan strategi yang mereka lakukan berbeda-beda, yaitu melalui konstitusi, legislasi dan dakwah Islam secara kultural.

Beberapa strategi tersebut dapat dilakukan, namun secara bertahap, yaitu strategi legislasi dan dakwah secara kultural dapat dilakukan secara bersamaan. Pada dasarnya, penerapan hukum memerlukan keabsahan secara yuridis melalui legislasi, di samping juga memerlukan kesiapan masyarakat dalam menerima dan mentaati peraturan hukum tersebut. Adapun perjuangan penerapan syari'at Islam melalui konstitusi, yaitu dengan memasukkan tujuh kata dari Piagam Jakarta, masih berat untuk dilakukan karena masih terdapat kelompok masyarakat yang resisten terhadap hal tersebut⁷⁷.

⁷⁶ Kuntowijoyo. 1998. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, cet 8, Bandung: Mizan.

⁷⁷ Azra, Azyumardi. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggapan bahwa Piagam Jakarta akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan antar agama, bahkan intern agama Islam itu sendiri, masih mendominasi pemikiran masyarakat Indonesia, maka itu strategi ini memerlukan persiapan yang sangat berat, baik ditingkat perumusan, sosialisasi, maupun ditingkat politik. Hal ini memerlukan kekuatan politik yang mendukungnya baik di legislatif, majlis, maupun organisasi massa, dan masyarakat secara umum.

Didalam konsep pembaharuan hukum islam, legislasi merupakan upaya pembaharuan hukum Islam guna beradaptasi dengan sistem hukum Barat yang kini telah dianut di berbagai negara Islam termasuk Indonesia. Legislasi dilakukan dengan merumuskan hukum Islam dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang disusun dengan bab dan pasal-pasal (dalam Legal Drafting) untuk diajukan sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Badan Legislatif guna mendapat persetujuan, kemudian disahkan dalam lembaran negara menjadi suatu peraturan perundang-undangan.

Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan dalam rangka legislasi hukum Islam tersebut sebagai berikut:

1. Tahap Perumusan

Tahap ini merupakan pemilahan materi hukum Islam yang akan dilegislasikan. *Fiqh* misalnya, dibagi dalam beberapa aspek, diantaranya aspek individual (hubungan manusia dengan Tuhan *ansich*) seperti sholat, puasa, etika (makan, minum, buang air), aspek ibadah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkait dengan aspek sosial dan kultural seperti sholat jum'at, serta materi *fiqh* dalam bidang *mu'amalah* yang terkait dengan aspek sosial dan kultural, yang membutuhkan peraturan yuridis, seperti perkawinan dan perceraian, kewarisan, perwakafan, pengelolaan, zakat dan sebagainya⁷⁸.

2. Tahap Sosialisasi

Pada dasarnya hukum merupakan peraturan yang berisi perintah dan penilaian yang ada dalam masyarakat dengan sendirinya. Namun adanya ide-ide positivisme yang merambah dalam berbagai aspek kehidupan manusia termasuk hukum, maka hukum menjadi peraturan yang positif yang diformalkan melalui justifikasi yuridis suatu negara.

3. Tahap Politis

Setelah tahap perumusan dan sosialisasi, maka diperlukan kekuatan yang mendukung peraturan hukum tersebut untuk mendapatkan legalitas secara yuridis oleh negara (keberlakuan yuridis suatu peraturan hukum). Dalam konteks Indonesia, upaya-upaya ini dapat dilakukan melalui jalur pemerintah (eksekutif) maupun jalur legislatif, karena legislasi suatu peraturan perundang-undangan dapat diajukan oleh pemerintah yaitu Presiden atau departemen yang terkait dengan persetujuan DPR, ataupun dengan usulan DPR (RUU inisiatif) untuk disahkan dengan persetujuan Presiden⁷⁹.

⁷⁸ Ibid hal 58

⁷⁹ Effendi, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau Teori Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” berarti rakyat, dan “kratos” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang meraka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan preformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya⁸⁰.

Menurut C.F. Strong demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatannya rakyat.

Menurut M. Durveger didalam bukunya. “Les Regimes Politiques” artian demokrasi itu termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah-pisah, artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya

⁸⁰ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raha Grafindo, Jakarta, 2014, hlm.196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah⁸¹.

Demokrasi terdapat dua kelompok aliran yang paling penting yaitu demokrasi konstitusional dan kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi tetapi hakekatnya memaksakan dirinya atas komunisme, perbedaan kedua aliran yang sangat fundamental ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya suatu negara hukum (*Rechtsstaat*), yang tunduk pada Rule of Law. sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintahan yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machsataat*) dan yang bersifat totaliter.

Teori demokrasi sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung (*direct democracy*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people, by the people and for the people*). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktator pada negara-negara kota (*city state*) di Yunani kuno. Pada saat itu demokrasi yang dipraktekan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik.

Demokrasi secara langsung dalam perkembangan kemudian maka sulit untuk dipraktekan karena wilayah negara terbentuk semakin luas

⁸¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 200

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan urusan-urusan pemerintah semakin kompleks, sehingga tidak mungkin semua orang berperan sebagai penyelenggara negara. Oleh sebab itu lahirnya sistem perwakilan (*Indirect Democracy*) atau (*Representative Democracy*), dimana rakyat tidak lagi secara langsung terlibat dalam pemerintahan melainkan oleh wakil-wakil yang merupakan kehendak rakyat. Demokrasi dikatakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik yang diselenggarakan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh mereka yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu pemilihan bebas.

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama adalah rakyat dalam proses sosial dan politik⁸². Sebagai pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yakni:

1. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*). Pemerintahan dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.
2. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) pemerintahan oleh rakyat merupakan bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi.
3. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) pemerintahan untuk rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat

⁸² Josep A. Scumpeter, *Capitalis, Socialism dan Democracy*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 361

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Dapat disimpulkan bahwasanya demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan disuatu negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara dijalankan oleh pemerintahan tersebut. Konsep demokrasi merupakan sistem yang amat penting dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (*trias politica*) yaitu kekuasaan yang diperoleh dari rakyat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat.

2. Model-Model Demokrasi

Sejarah demokrasi terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik dimana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri) atau suatu bantuan bagi pembuat keputusan (suatu cara pemberi kekuasaan kepada pemerintahan melalui pemberian secara periodik)⁸³. Konflik ini telah memunculkan tiga jenis atau model demokrasi yakni:

- a. Demokrasi partisipatif atau demokrasi langsung, suatu sistem dimana pengambilan keputusan tentang permasalahan umum melibatkan warga negara secara langsung. Ini adalah tipe demokrasi “asli” yang terdapat di Athena kuno, diantara tempat-tempat yang lain.

⁸³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Op, Cit hlm 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Demokrasi Liberal atau demokrasi perwakilan suatu sistem pemerintahan yang menggunakan “pejabat” yang dipilih untuk “mewakili” kepentingan atau pendapat warga negara dalam daerah-daerah yang terbatas sambil menjunjung tinggi aturan hukum.
- c. Demokrasi yang didasarkan atas model atas suatu partai⁸⁴.

Adapun dalam sejarah teori demokrasi terdapat banyak pandangan yang berbeda mengenai demokrasi, sehingga muncul beberapa teori dan pandangan terkait demokrasi. Menurut David Held:

- a. Demokrasi Klasik adalah warga negara seharusnya kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran
- b. *Republikanisme Protektif* adalah partisipasi politik merupakan sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi; jika para warga negara tidak menguasai mereka sendiri, mereka akan didominasi oleh orang lain.
- c. *Republikanisme* adalah warga negara harus menikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang pun yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semuanya dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan bersama⁸⁵.

⁸⁴ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2012, hlm 67

⁸⁵ Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 45

D. Keorganisasian Masyarakat

1. Tinjauan Teori Keorganisasian Masyarakat

Teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, salah satu kajian teori organisasi, diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Selain itu dipelajari bagaimana sebuah organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang didalamnya maupun lingkungan kerja organisasi tersebut. Menurut Lubis dan Husein bahwa organisasi itu adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerja sama pada setiap individu⁸⁶.

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja dalam suatu organisasi tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada. Ada beberapa pembagian dari teori organisasi yaitu:

a. Teori Organisasi Klasik

Teori Organisasi Klasik kadang-kadang disebut juga teori tradisional, yang berisi (abad 19) yang mendefenisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan,

⁸⁶ M. Solly Lubis Loc. Cit hal 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peranan-peranan, kegiatan-kegiatan. Dalam teori ini, organisasi secara umum digambarkan oleh para teoritis klasik sebagai sangat tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik structural yang kaku dan tidak mengandung kreativitas.

b. Teori Organisasi Neoklasik

Teori Neoklasik secara sederhana dikenal sebagai teori/aliran hubungan (*The Human Relation Movement*). Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Anggapan dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan social karyawan sebagai individu maupun sebagian bagian kelompok kerjanya, atas dasar anggapan ini maka teori neoklasik mendefenisikan “suatu organisasi” sebagai sekelompok orang dengan tujuan bersama. Perkembangan teori neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaan yang dilakukan di Hawthorne dan dari tulisan Huga Munsterberg⁸⁷.

c. Teori Organisasi Modern

Teori modern ditandai dengan lahirnya gerakan contingency yang dipelopori Herbert Simon, yang menyatakan bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang dibawahnya dapat diterapkan prinsip yang saling bersaing. Kemudian Katz dan Robert Kahn dalam bukunya “*The Social Psychology Of Organization*”

⁸⁷ M. Solly Lubis Loc. Cit hal 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenalkan perspektif organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Teori modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai salah satu kesatuan saling ketergantungan, yang didalamnya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu system tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan system terbuka⁸⁸.

Fenomena organisasi didalam masyarakat telah lama menjadi pusat perhatian para ahli dari berbagai disiplin ilmu sosial. Berbagai pandangan dan pemikiran yang muncul mengenai fenomena organisasi ini telah melahirkan suatu bidang pengetahuan yang secara khusus mengkaji mengenai fenomena organisasi, yang secara umum dikenal dengan istilah teori organisasi, dan ada beberapa umum ciri-ciri organisasi atau administrasi pada umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kelompok manusia, terdiri atas dua orang atau lebih.
2. Adanya kerja sama dari kelompok-kelompok tersebut.
3. Adanya kegiatan atau proses.
4. Adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan.
5. Adanya tujuan

Dalam organisasi memiliki fungsi yang sangat bermacam-macam, fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

⁸⁸ Wahyudi Nawawi, "Teori Organisasi" (Unit Penerbitan Majalengka, 2013), h1-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengorganisasian
3. Penggerakan
4. Pengawasan

Dalam organisasi tentunya harus memiliki struktur organisasi, adapun macam-macam struktur organisasi antara lain:

1. Struktur organisasi piramida
2. Struktur organisasi vertikal
3. Struktur organisasi horizontal
4. Struktur organisasi melingkar⁸⁹

2. Tinjauan Teori Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Adapun syarat administrasi dalam mendirikan sebuah yayasan ataupun perkumpulan (organisasi) yang berbadan hukum adalah:

1. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. AD (Anggaran Dasar) ART (Anggaran Rumah Tangga)
3. Pendiri
4. SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

⁸⁹ Ibid hal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Selebar foto tampak depan kantor sekretariat/ormas/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lengkap dengan papan nama dan alamat Ormas/ LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ukuran Kartu Pos
6. Surat izin domisili kantor dari Kelurahan/Kecamatan
7. Surat keterangan diatas materai Rp. 6.000 tidak sedang terjadi konflik internal
8. Surat keterangan tidak berafiliasi dengan/ atau underbow politik, tidak menggunakan Lambang Garuda sebagai Lambang Organisasi
9. Data keuangan
10. Khusus untuk partai politik, ada ketentuan tambahan yang mengharuskan untuk didaftarkan kepada Kementrian Hukum dan HAM RI
11. Pendaftaran pada Departemen Dalam Negeri RI
12. Pendaftaran pada Bankerbang⁹⁰

⁹⁰ Amitai Etzioni, "Organisasi-Organisasi Modern" (Kencana Premada: Jakarta, 2007), h

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan:

1. Organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan atau dicabut izin badan hukumnya melalui keputusan Kemenkumham Nomor AHU.30.AH.01.08 pada Tanggal 19 Juli 2017, karena sebagai ormas berbadan hukum HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan Nasional, kegiatan yang dilakukan oleh HTI pun merupakan terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan dimasyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.
2. Organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan atau dicabut izin badan hukumnya adalah isi anggaran dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Ormas, melalui keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tertanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI sebagai Ormas hanya berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat perpanjangan SKT.
3. Perspektif Fiqih Siyasah kewenangan pembubaran itu dimiliki oleh Wazir al-Tafwidh sebagai pembantu Khalifah bidang pemerintah dalam sistem ketatanegaraan Islam, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam oleh pemerintah didasarkan PERPPU Nomor 02 tahun 2017, karena dipandang sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Segala kebijakan pemimpin harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dari segala yang berpotensi menimbulkan kemudharatan dan dihindari dan dijauhi, maka dari itu keputusan pemerintah dalam membubarkan HTI dan FPI sudah sangat tepat, demi kemaslahatan yang besar serta demi kepentingan warga negara secara keseluruhan terutama warga negara Indonesia

B. Saran:

1. Kepada Organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam khususnya pengurus dan anggota agar dapat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pancasila sebagai ideology bangsa Indonesia.
2. Kepada pemerintah sangat diharapkan untuk dapat memberikan perhatian lebih berupa edukasi ideologi Indonesia kepada Organisasi-organisasi masyarakat lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Rahman Al-Sa'di, *Al-taisir Al-Karim Al-Rahman fitafsir Al-Kalaamil Mannan* (Bairut: Risallah Publisir, 2000)
- Al-Zastrow, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, 90.
- Amir Etzioni, *"Organisasi-Organisasi Modern"* (Kencana Premada: Jakarta, 2007),
- Azman, *Jurnal Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia*, Vol. 7/ No. 1/2018.
- Aza, Azyumardi. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- B. Arief Shidharta, *"Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum"*, dalam (*Jurnal Hukum*), *"Rule of Law"*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal. 124-125
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta 2014)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan (Karya Agung Surabaya: 2006)* hal. 1987
- Effendi, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina
- HA Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah praktis*, cetakan ke 4, Jakarta, 2011
- Has Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Bandung: 2016)
- <https://syukrihaekal03.wordpress.com/tag/organisasi-dalam-perspektif-al-quran>
- Idberita.yahoo.com
- Jafar Umar Thalib, *Mengenal Sejarah dan Pemahaman Ahlusunnaah Wal Jama'ah* (Yogyakarta: Yayasan Assunnah, 1995), 14
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta Timur: 2011)
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang* (Jakarta : Rajawali Pers 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Josep A. Scumpeter, *Capitalis, Socialism dan Democracy*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 361

Kasil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Rahman, Fazlur 1995. *Islam dan Modernitas: sebuah Transformasi intelektual*, ahli Bahasa Ahsin Muhammad, cet 2. Bandung : Pustaka

Kuntowijoyo. 1998. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, cet 8, Bandung: Mizan.

M Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2012, hlm 67

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014) Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* hlm 215

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, Indonesia: Pranada media Group, 2014

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raha Grafindo, Jakarta, 2014,

Nurul Qamar Dan Farah Rezah *Ilmu Kenegaraan* (Staatswissencaft). (Jakarta: Sinar Mitra Wacana Media 2015)

Pedoman Front Pembela Islam (AD/ART) 2013

Ridwan HR, *Fiqh Politik*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2007)

Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014,

Shihab, *Dialog FPI-Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, 92.

Shihab, *Dialog FPI-Ammar Ma'ruf Nahi Munkar*, 90

Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Kaum Fundamental : Pengalaman Hizb al-tahrir Indonesia* (Malang: UMM, 2010)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan Pasal 1

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah al-zuhaili, *At-Tafsir al-Wajiz Ala Al-Haamiz Al-Qur'an Al-Adzim*, (Damaskus: Daar Al-Fikr), h. 272

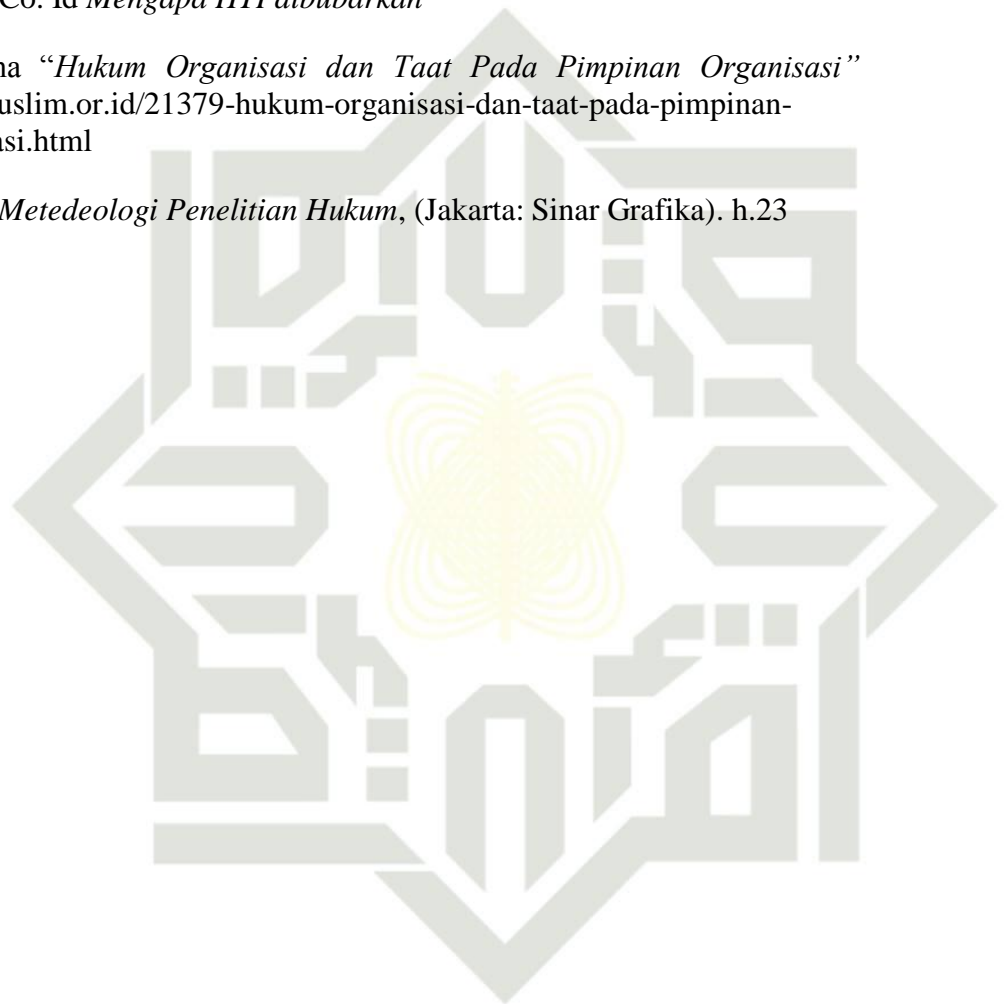
Wahyudi Nawawi, *"Teori Organisasi"* (Unit Penerbitan Majalengka, 2013), h1-4

www.Liputan6.Com/Menkopolhukam-Menetapkan-Perpu-No2-Tahun-2017
Diakses Pada 28 Oktober 2019

WWW.Tempo.Co. Id *Mengapa HTI dibubarkan*

Yuhan Purnama *"Hukum Organisasi dan Taat Pada Pimpinan Organisasi"*
<http://muslim.or.id/21379-hukum-organisasi-dan-taat-pada-pimpinan-organisasi.html>

Zamuddin Ali, *Metedeologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika). h.23



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kripsi dengan judul, **“PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2013 TENTANG KEORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBUBARAN ORMAS ISLAM DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** yang ditulis oleh :

: ILHAM REZKI PERDANA
: 11724100599
: Hukum Tata Negara Syiasah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
Waktu : Jam, 08.00 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I

Drs. Yusron Sabili, M.Ag

Penguji II

Al-Faris Fahrullah, M.Ag

Mengetahui,

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Ilham Rezki Perdana**
 NIM : **11724100599**
 Jurusan : **Hukum Tata Negara (SIYASAH)**
 Judul : **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Keorganisasian Masyarakat Terhadap Pembubaran Ormas Islam Menurut Perspektif Fiqih Siyash**

Pembimbing : **Irfan Zulfikar M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 Juli 2021

Pimpinan Redaksi,



M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

ciptanya Dilarang

menyebarkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penguip pan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penguip pan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau